ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitatif. Permasalahan muncul dalam kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang dalam praktik masih berpotensi dikenakan ketentuan pidana mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika, sehingga hak untuk memperoleh rehabilitasi belum sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengkaji penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Narkotika telah memberikan ruang perlindungan melalui ketentuan rehabilitasi, khususnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Namun, ketidakjelasan kedudukan pengguna untuk diri sendiri serta penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 dapat menyebabkan pengguna lebih berorientasi pada pemidanaan. Penentuan penanganan seharusnya tidak hanya didasarkan pada jumlah barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan tujuan penguasaan, keterlibatan dalam peredaran gelap, kondisi pengguna, dan hasil asesmen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penerapan hukum yang lebih jelas dan konsisten agar pengguna narkotika untuk diri sendiri memperoleh perlindungan hukum dan rehabilitasi secara proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a legal and social issue that requires treatment not only through criminal punishment but also through a rehabilitative approach. The problem arises from the legal status of narcotics users for personal use, who in practice may still be subject to criminal provisions concerning the possession or control of narcotics, resulting in their right to rehabilitation not being fully protected. This study aims to analyze the legal protection afforded to narcotics users in narcotics abuse offenses and to examine the implementation of rehabilitation for narcotics users for personal use. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through library research and analyzed prescriptively. The results indicate that the Narcotics Law provides legal protection through rehabilitation provisions, particularly Articles 54, 103, and 127. However, the unclear legal status of users for personal use and the application of Articles 111, 112, 117, and 122 may result in a predominantly punitive approach toward users. Legal treatment should not be determined solely based on the quantity of narcotics possessed, but should also consider the purpose of possession, involvement in illicit narcotics trafficking, the user's condition, and the results of an assessment. Therefore, clearer and more consistent legal regulation and implementation are required to ensure that narcotics users for personal use receive proportional legal protection and rehabilitation.

Keywords: *Legal Protection, Rehabilitation, Drug-related crimes.*